

# PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA:

## TRADISI, AKOMODASI DAN MODERNISASI

Oleh: Prof. H. Judistira Garna, Ph.D.

### 1. Pendahuluan

Tampaknya tidaklah terlalu mudah untuk menguraikan dan membahas suatu gejala kehidupan manusia, yang disebut perubahan sosial itu dari hanya satu paradigma ilmu-ilmu sosial. Hal yang pertama ialah karena ilmu-ilmu sosial itu sendiri memiliki sejumlah ilmu yang tergabung di dalamnya, dari mulai sosiologi, antropologi sampai ke ekonomi. Kedua ialah terdapat berbagai aliran teori dalam ilmu-ilmu itu, yang untuk setiap model atau teori mempunyai perbedaan dalam menanggapi gejala sosial dan terdapat tradisi intelektualnya sendiri sehingga diversitas teori itu akan melingkupi teori yang besar dan kecil (Sani, 1986:4; Warshay, 1975:xv).

Dari sudut pandang ilmu sosial pada hakekatnya alam sosial manusia itu ialah binaan abstrak dari teori-teori yang dikemukakan dalam berbagai konsepnya didasarkan dari penelitian empirik. Apa yang tampak dari sisi empirik alam sosial tersebut adalah tingkah laku dan interaksi berpola yang dilakukan oleh anggota suatu masyarakat. Dalam memahami makna dari tingkah laku dan interaksi berpola itupun memungkinkan adanya penafsiran yang tak serupa. Sosiologi misalnya akan memahaminya jika diamati menurut perspektif teori yang tertentu, sedangkan Antropologi akan mencoba untuk memahami sebagaimana makna yang diberikan oleh anggota masyarakat kemudian barulah digunakan perspektif teori tertentu. Hal itu menunjukkan bahwa

ilmu pengetahuan pun mempunyai tradisi-tradisi tertentu selain menempuh proses perkembangan atau perubahan dari suatu waktu ke waktu lainnya.

Sehubungan dengan itu dalam membicarakan kehidupan dan perkembangan suatu masyarakat, tradisi ilmu-ilmu sosial menggunakan berbagai paradigma dengan model-model berbeda untuk menanggapi gejala sosial yang diamatinya. Dalam sejarah pemikiran sosial terdapat dua sisi kehidupan manusia yang diperhatikannya, yaitu kewujudan bentuk hubungan yang mapan antara unsur-unsur sosial atau tatanan sosial (social order) dan perubahannya yang berlaku dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Auguste Comte misalnya, memandang masyarakat sebagai suatu proses evolusi dan perkembangan, yang dengan demikian tugasnya ialah membentuk keragaman untuk mengatur perkembangan itu (Etzioni, Etzioni-Halevy, 1973:3).

Pembahasan tentang perubahan sosial di Indonesia sebaiknya tidak hanya membicarakan satu jangkauan proses tertentu saja dalam kehidupan sosial tetapi menyangkut berbagai tahapan dan lingkup. Selain itu berbagai disiplin ilmu yang termasuk ilmu-ilmu sosial, atau ilmu lain yang kaitannya karena ilmu dimaksud mempelajari manusia secara holistik integratif mempunyai makna penting dari sisi-sisi teoretik dan aplikatif. Artinya kedua sisi hakekat ilmu, teori dan aplikasi, tidaklah terpisah satu dengan yang lainnya.



Tradisi yang ada di dalam setiap masyarakat adalah tatanan sosial yang berwujud mapan, baik mapan sebagai bentuk hubungan antara unsur-unsur kehidupan maupun sebagai bentuk aturan sosial yang memberi pedoman tingkah laku dan tindakan anggota suatu masyarakat. Dinamika sosial ditunjukkan oleh cara-cara pengambilan alihan unsur sosial atau budaya luar yang karena menghadapi ruang dan waktu memerlukan sikap dan tindakan yang akomodatif dari para anggota masyarakat, yang hakekatnya tiada lain adalah untuk mengembangkan kehidupan mereka. Sehubungan dengan itu tradisi merupakan warisan sosial-budaya yang selalu ingin dipertahankan oleh warga masyarakat pendukungnya sebagai identitas penting kehidupan mereka. Tanpa identitas adakah makna sosial kehidupan ini?

Adapun proses kehidupan manusia Indonesia telah berlangsung dalam kurun waktu panjang, antara lain pada masa silam mengalami tahapan-tahapan yang terbentuk oleh pengaruh luar dan sistem sosial kolonial sehingga cenderung tidak mengalami perubahan cepat. Walaupun gejala-gejala perubahan pada masa itu bermula tetapi kemerdekaan telah lebih cepat merubah masyarakat untuk menata dirinya dengan aturan-aturan, organisasi, kehendak dan harapan sendiri sesuai dengan aspirasi kebangsaan Indonesia. Tahapan pembangunan lima tahun dapat dipandang sebagai sejumlah proses untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, kesejahteraan manusia seutuhnya. Jelaslah bahwa pembangunan adalah cara untuk mengembangkan dan meningkatkan kehidupan yang menghendaki perubahan sosial. Sikap yang akomodatif terhadap modernisasi akan memberi peluang besar bagi keberhasilan pembangunan, tetapi juga tidak meninggalkan tradisi-tradisi sebagai akar kehidupan selama ini yang merupakan identitas atau karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk itu. Dalam kenyataan hal itu tidaklah mudah dibentuk oleh program-program pembangunan yang memerlukan waktu berdampak sesuai dengan tujuannya dibandingkan dengan perubahan sosial yang cepat dan tak mengenal sasarannya itu.

## 2. Orientasi Ilmu-ilmu Sosial Terhadap Perubahan

Dari beberapa sub-disiplin dalam ilmu-ilmu sosial, sosiologi misalnya sebagai ilmu tentang "tatanan sosial" dan "perubahan sosial" lahir pada abad ke-19. Pada abad ke-20 curahan perhatian sosiologi terlalu menekankan akan teori akbar dan empirisme yang abstrak, sehingga karena itu kekurangan alat untuk memahami perubahan dunia yang cepat (Lauer, 1977). Jika kemudian timbul ilmu sosiologi yang disebut "the sociology of development" untuk menolong negara-negara berkembang (underdeveloped) tampaknya tidaklah tampil seperti yang diharapkan, ilmu sosiologi itu sendiri malahan menjadi underdeveloped (Frank, 1967). Sedangkan dalam antropologi dikenal "development anthropology" sebagai pengembangan dari antropologi terapan yang memperhatikan berbagai sisi masalah modernisasi (Cochrane, 1971). Pendalaman melalui studi yang mikro seringkali dianggap tak berfaedah oleh disiplin ilmu lainnya. Sedangkan ilmu ekonomi yang cenderung menjadi suatu ilmu rekayasa atau teknis, di satu sisi bermanfaat memecahkan masalah teknis tetapi pada sisi lain menimbulkan dampak sosial-budaya. Hal itu sebenarnya berlaku bukan karena menolak kesejahteraan yang dicapai melalui pembangunan tetapi timbul perbedaan persepsi dalam cara menyesuaikan tradisi dengan ketentuan baru, atau masyarakat kehilangan nilai-nilai kehidupannya yang ada dalam tradisi mereka.

Masalah kehidupan manusia tidaklah habis, sepanjang kehidupan itu sendiri masih berlangsung, dan demikian pula halnya dengan kesinambungan tema dari simposium ini. Dari saat SKIM I yang membicarakan tentang teori, penerapan dan pengembangannya maka lima tahun kemudian tampaknya ada kesan berputar balik kepada kajian garis besar atau studi makro. Mungkin hal penting dari suatu kajian makro ialah selalu menarik perhatian orang dan tidak sukar dibahas. Kajian makro itu seringkali diperlukan dengan segera untuk memahami atau bahkan sebagai upaya memecahkan suatu masalah. Dalam proses pembangunan seperti masa kini oleh adanya dorongan keperluan praktis untuk mendukung



proses pembangunan tampak perlu berpaling ke berbagai sisi, walaupun hanya untuk saling memahami lagi antar ilmu, dan melihat kembali kajian makro sebagai studi antar disiplin ilmu pengetahuan.

Dalam masa lima tahun (setelah pertemuan pada SKIM I) tentulah belum sepenuhnya melaksanakan ide-ide menumbuh kembangkan ilmu-ilmu sosial, khususnya antropologi dan sosiologi, yang memiliki karakteristik nusantara dan mampu pula menjawab tantangan masalah-masalah sosial budaya yang dihadapi di Indonesia dan Malaysia. Kiranya ruang, waktu dan kepentingan perlu diperhatikan karena itu orientasi ilmu-ilmu sosial adalah selalu harus menaruh perhatian kepada dua sisi tersebut, yaitu kajian makro yang mempelajari proses pembangunan, dan kajian mikro yang mampu membentuk teori dari sumber tumbuh kembangnya masyarakat Indonesia dan Malaysia. Apabila salah satu tujuan simposium ini ialah pertemuan dan perbincangan antara berbagai disiplin ilmu pengetahuan, maka kajian makro mempunyai kecenderungan untuk dapat dipahami oleh semua pihak, karena membicarakan dan mencoba memahami gejala-gejala tentang proses kehidupan kita sendiri.

### 3. Perubahan Sosial Indonesia dalam Lintas Sejarah

Suatu pembahasan tentang perubahan sosial di Indonesia kiranya tidak terlepas dari perjalanan masyarakat Indonesia itu sendiri dalam menembus sejarah perkembangannya. Dalam abad ke-19 dan sebelumnya, perhatian terhadap wilayah ini semakin besar antara lain karena letak geografis yang strategis dan potensi sumber-sumber pertanian serta alam Indonesia. Sebagai akibatnya telah membuka untuk datangnya pengaruh-pengaruh luar, tetapi belumlah menyebabkan perubahan sosial yang bersifat struktural sehingga mampu menggeser masyarakat dari posisi tradisional kepada keadaan yang lain. Kemungkinan lain dari perubahan yang relatif lambat itu ialah peradaban industrial negara-negara Barat yang membawa pengaruh itu memang tidak menghendaki arah perubahan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, atau

arahnya sesuai dengan sistem politik yang berlaku masa itu.

Berbagai kebijakan sosial-ekonomi pemerintahan kolonial telah mengenalkan sejumlah unsur-unsur kehidupan baru. Masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran langkah kebijakan itu tetap kukuh memegang tradisi mereka, walaupun beberapa kelompok etnik telah beralih agama. Jika demikian introduksi dan pelaksanaan sistem sosial dan ekonomi yang baru itu, lebih merupakan alasan eksploitasi terhadap potensi-potensi sosial dan budaya Indonesia, dan tidak memperdulikan dilema terpaksa memilih dan memendam harapan masyarakat.

Adapun pengaruh-pengaruh luar tersebut masih mampu disaring oleh norma dan tatanan masyarakat, atau menjadi pelengkap dan malahan telah memperkaya khazanah sosial budaya masyarakat. Pengaruh sosial budaya luar yang disertai oleh kedatangan masyarakat pendukungnya, pada satu sisi melengkapi tradisi masyarakat setempat dan pada sisi lainnya meninggalkan enklaf-enklaf masyarakat keturunannya yang sistem kehidupan mereka tidak seutuh pendahulunya. Demikian pula halnya dengan agama, karakteristik dan tradisi dari kelompok masyarakat penyebar agama itu telah memberi warna kehidupan agama dan tidak selalu serupa dengan asal sumbernya. Sehubungan dengan itu dapatlah dikemukakan bahwa tatanan masyarakat, yang berupa sejumlah unsur tradisi penting dan menjadi pedoman kehidupan, tampak berkesinambungan dari masa ke masa. Misalnya pembagian masyarakat, terutama seperti yang berlaku di pulau Jawa menurut lapisan raja - bangsawan dan petani, sebenarnya telah ada sejak masa Hindu. Sedangkan tradisi lapisan sosial yang lebih lama lagi dalam pelapisan masyarakat adalah dibedakan oleh keterkaitan dengan karuhun (nenek moyang). Adanya pelapisan semacam itu adalah peluang bagi hirarki kepemimpinan baru yang hakekatnya masih berlanjut dari tradisi kepemimpinan lama.

Sampai akhir abad ke-19 produk revolusi industri, yaitu liberalisme, kapitalisme dan nasionalisme Eropa dengan sistem sosial, ekonomi dan politik dibawa sendiri oleh masya-



rakat pendukungnya, Barat, dan disebarkan kepada masyarakat yang dikuasainya. Pengaruh luar cenderung merupakan suatu kekuatan mutlak yang tak mudah ditolak oleh masyarakat setempat, tetapi walaupun demikian kebudayaan tradisional memiliki mekanisme untuk menghindarkan diri atau mempunyai strategi budaya yang tidak secara mentah-mentah tertelan pengaruh luar tersebut. Keadaan itu mampu memperpanjang, bahkan mengembangkan masyarakat setempat dalam lingkup tradisionalismenya. Tahun 1870 misalnya, dikenalkan *suikerwet* dan *agrarische wet* yang memungkinkan perkebunan sektor swasta membuka usaha dengan orientasi ekspor, dan mengakibatkan pula ekspansi tanah ke luar Jawa. Mitos kerja masyarakat masih berorientasi kepada tradisi asal mereka.

Bagian akhir abad ke-19 telah berlaku beberapa perubahan penting yang telah memberi kemanfaatan besar bagi pemerintahan kolonial, tetapi kemudian tampak 'sadar' dan berupaya untuk memberi jasa kepada masyarakat jajahannya melalui politik etik. Perubahan yang berlaku itu antara lain hapusnya kerja paksa, Indonesia termasuk dalam lintas ekonomi dunia, sistem pertanian terbuka, hak milik pribadi, dan perkembangan ekonomi kolonial. Dampak lain yang dialami ialah disintegrasi dalam nilai-nilai moral dan etika, mulai terjadi urbanisasi, dan pola pikir tradisional tertantang oleh pola berpikir rasional (Harsojo, 1972:4-5).

Politik etik pemerintahan Hindia Belanda itu membawa tiga kebijakan penting yang menjadi pendorong perubahan, yaitu irigasi, emigrasi dan edukasi. Edukasi yang membuka pikiran masyarakat dan memberi harapan secara spiritual dan material. Sebaliknya edukasi dapat merupakan suatu dinamit dalam struktur masyarakat kolonial karena perubahan pola berpikir yang diakibatkannya. Tidaklah mengherankan apabila pada kurun waktu sebelum Perang Dunia ke-2, di sekitar tahun 1945 misalnya, timbul upaya para pakar untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara ilmiah. Dalam bahasan Raymond Kennedy tentang krisis kolonial dan masa depannya antara lain mengemukakan bahwa:

"Slowly, ... three counteracting developments have been weakening the institution and preparing the way for its dissolution. In the first place, the practical advantages of colonialism have been declining.... A second development, ... is the diffusion of Western civilization to the colonial areas... Finally, the institution of colonialism is being weakened by the rising tide of democratic enthusiasm in the Western world, where the ideal of democracy is itself undergoing a change: (1945:345-346).

Jauh sebelum timbulnya pemikiran tersebut, semangat kebangsaan Indonesia tumbuh dengan cepat yang disebarkan di seluruh Nusantara, baik melalui organisasi tradisional maupun modern, seperti Budi Utomo. Cita-cita bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa modern yang memiliki kesatuan bangsa, tanah air dan bahasa, telah menampakkan wujudnya dengan berkumandang Sumpah Pemuda tahun 1928. Demikianlah gejolak-gejolak masyarakat untuk menentang penjajahan itu telah membuat suatu pemikiran kembali (rethinking) para ilmuwan sosial, yang antara lain tertuang dalam sebuah buku yang dianggap sebagai ajakan seorang antropolog kepada para pakar ilmu-ilmu sosial dan humanitas untuk melakukan upaya mengorganisasikan lagi dunia dalam perspektif baru karena masalahnya yang makin kompleks itu (Linton, 1945: vii).

#### 4. Perubahan Sosial dalam Beberapa Ragam Masyarakat

##### 4.1 Masyarakat Terasing atau Sukubangsa Berkembang

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tidaklah mudah untuk menggambarkan secara selintas tentang perubahan sosial di Indonesia, karena itu uraian tentang perubahan sosial secara makro lebih baik mulai tentang potret-potret kelompok masyarakat. Kelompok 'masyarakat terasing' dikategorikan sebagai masyarakat yang tertinggal oleh proses perubahan sosial, atau yang relatif terbelakang kehidupannya. Dengan demikian kelompok ini dianggap tidak maju, alam pikirannya bersahaja dan kuat memegang tradisi, bahkan



dianggap tak termasuk kelompok etnik tempatnya bermukim. Karena suatu konsep seringkali menentukan pola kegiatan suatu departemen, misalnya pandangan Departemen Sosial tentang konsep 'masyarakat terasing' yang mempengaruhi pola pembinaannya, pada daftar 1 berikut tertera proses konsep itu dalam kurun waktu 1969-1985.

**Daftar 1. Konsep "Masyarakat Terasing" menurut Depsos.**

Th.	Perkembangan pengertian
1969	Masyarakat suku-suku yang proses perkembangan kehidupan dan penghidupannya secara tersendiri dalam arti khusus yang terikat pada situasi dan waktu.
1974	Kelompok masyarakat yang karena sistem sosial budayanya memiliki proses perkembangan tersendiri dan mengalami keterbatasan komunikasi, sehingga mengakibatkan tingkat kehidupan dan penghidupannya berlangsung secara sederhana, terpencil, terpencar serta kurang dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.
1981	Kelompok masyarakat yang karena tempat tinggalnya masih terpencil dan terisolir mengalami keterbatasan komunikasi dengan masyarakat yang lebih maju serta pelayanan pemerintah sehingga mengakibatkan keterbelakangan dalam kehidupan dan tertinggal dalam proses perkembangan kehidupan di bidang agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
1985	Masyarakat yang kondisi kehidupan dan penghidupannya masih sangat sederhana dan terbelakang, baik oleh karena tempat tinggalnya yang terpencil, tersebar dan terasing, karena isolasi fisik dan sosial budaya, sehingga tidak/kurang adanya komunikasi fisik serta sosial budaya dan belum terjangkau oleh pelayanan pembangunan.

Sumber: Kompilasi dari data Depsos RI (1986); Gama (1987).

Satu hal penting tentang kelompok masyarakat semacam itu yaitu tidaklah statis seperti dianggap orang, atau memiliki alam pikiran bersahaja yang dipengaruhi kuat oleh tradisi, ataupun tidak memiliki kepercayaan. Pengertian tentang 'masyarakat terasing' tersebut sebagai konsep kerja atau operasional para penyuluh masyarakat tampak berubah dari waktu ke waktu. Hal itu dapat disebabkan oleh perubahan pandangan pemerintah sebagai pendorong pembangunan, memang perubahan telah berlangsung sebagai akibat pengaruh luar serta kehendak mereka sendiri, atau terpaksa dilakukan sebagai solusi penyelamatan diri.

Berbagai pengaruh luar memungkinkan suatu kelompok masyarakat mengalami perubahan sosial, dalam waktu cepat atau melalui kurun waktu yang panjang, tergantung oleh berbagai aspek dorongan dari dalam dan luar masyarakat tersebut. Dalam kurun waktu ratusan tahun misalnya, kelompok Orang Baduy di Banten Selatan tidak statis seperti dianggap orang tetapi telah mengalami perubahan sosial pada berbagai unsur kehidupan mereka. Adapun masalah apakah perubahan sosial itu bermanfaat dan mendorong peningkatan kualitas kehidupan mereka, kiranya perlu diamati dari sisi pandang dan kepentingan mana hal itu dilihat. Sebagaimana berlangsung pada masa akhir-akhir ini, oleh pengaruh dan kepentingan luar yang deras melanda mereka telah berdampak kepada struktur sosial penting, yaitu terjadi "krisis dalam sistem kepemimpinan" mereka. Padahal para pemimpin inti Orang Baduy belum bersedia mengubah otoritas mereka sebagai pemimpin adat, agama dan sosial.

**Daftar 2. Beberapa gejala perubahan pada Orang Baduy.**

Waktu	Gejala perubahan
Masa Pra Islam	- kabuyutan (tempat para buyut) → mandala Tunggal (satu kuasa) → Batara Tunggal
Masa Islam	- wilayah Lebak Parahiang → Kanekes (desa) Baduy Karang → Urang Are Kawin Baduy-luar: Puun → Kawin: amil Pesta Kawalu → Seba
Masa Penjajahan	- wilayah Kanekes → Desa Kanekes Jaro (kepala, ketua) → Jaro Gubernuremen Seba: Sultan Banten → Seba: Pemda
Setelah 1945	- dangka (enklaf Baduy) → desa lain ekonomi subsisten → ekonomi kota Jaro Gubernuremen → Jaro Pamarentah

Sumber: Gama (1988, 1989a, 1989b).

Dalam upaya memahami dan mengembangkan kelompok 'masyarakat terasing' yang banyak tersebar di Indonesia dan Malaysia itu, kiranya tidak hanya antropolog dan sosiolog saja yang dapat berperan. Ilmu ekonomi pun dapat mempelajari tentang hakekat subsisten, pengaruh ekonomi kota, mitos kerja dan kerjasama, serta sistem logistik padi, huma di leuit (lumbung padi) secara mikro guna menyusun model-model misalnya. Mungkin sekali hal



penting bagi mengawali operasionalisasi kajian ialah perlu merubah anggapan, seperti istilah 'masyarakat terasing' dirubah menjadi 'suku-bangsa berkembang' (Garna, Koentjaraningrat, 1990: in press), merupakan salah satu penyebaran konsep yang relatif dianggap sesuai dengan hakekat masyarakat termaksud. Dari uraian itu tampak jelas bahwa tradisi itu sebenarnya adalah dunia sosial mereka yang paling mereka kenal dan yakini. Sedangkan kelenturan budaya yang seringkali mencuat peristiwa kontak budaya telah memberikan peluang adaptasi terhadap ruang dan waktu kehidupan yang sedang serta akan mereka jalani.

#### 4.2 Masyarakat Desa dan Desa-kota

Bagian terbesar asal penduduk kota adalah dari desa, atau biasanya masih ada kaitan kerabat dengan penduduk pedesaan. Dengan demikian sebenarnya tidaklah benar bahwa perkotaan ialah lawan pedesaan karena perubahan-perubahan yang berlangsung lebih tampak dalam berbagai aspek ekonomi, transportasi, teknologi dan lingkungan fisik sedangkan kebiasaan hidup, termasuk nilai-nilai budaya, tidak selalu sejalan dengan perubahan fisik tersebut. Perkembangan seperti itu dapat membuat kesenjangan antara kehidupan desa dengan kota, tetapi juga membuat ketergantungan desa kepada kota, atau malahan eksploitasi kota terhadap sumber-sumber desa. Migrasi penduduk dari daerah di luar Jawa ke Jawa, antara lain disebabkan oleh tarikan fasilitas yang lebih tersedia di Jawa. Untuk beberapa suku bangsa yang orientasi adatnya masih kuat ke wilayah asal, migrasi itu cenderung lebih mengekalkan tradisi mereka dalam suatu jaringan adat berdasarkan sistem kekerabatan secara nasional. Sejauh ini tampaknya konflik antar migran dan para migran dengan penduduk setempat lebih banyak terjadi di perkotaan. Kota adalah karena segalanya, sedangkan pedesaan seringkali menerima akibat dari keadaan tertentu, karena itu tidaklah mengherankan apabila tradisi relasi patron – klien masih dipertahankan oleh orang desa. Perubahan sosial di desa dengan begitu akan mengambil model-model para patron orang desa di kota tersebut.

Menahan arus penduduk ke kota selama ini masih kurang dapat menyelesaikan masalah peningkatan kehidupan masyarakat desa, demikian pula halnya dengan transmigrasi juga belum memecahkan masalah kepadatan penduduk desa dan kesempatan kerja dengan baik. Dari lintasan sejarah perkotaan Indonesia tampak bahwa pada mulanya penduduk desa itu hanya melakukan migrasi sementara untuk mengisi jeda kerja di lahan pertanian, yang kemudian lebih banyak menetap di kota karena kesempatan kerja di desa makin berkurang. 'City glamour' merubah bermukim sementara menjadi bermukim tetap dengan memilih tempat yang terjangkau kemampuan mereka. Bagi mereka yang tidak terlempar oleh gejolak kehidupan kota akan memilih tinggal di wilayah kota yang serupa dengan desa asalnya sehingga masih dianggap dapat memberi lindungan sosial-budaya.

Lindungan semacam itu diperlukan sebagai pijakan dasar dalam mengarungi perubahan sosial ke arah dan menjadi warga kota. Beberapa kategori kelompok masyarakat berdasarkan tahapan perkembangan adaptasinya akan membedakan pandangan dan relasi dengan desa asalnya. Gejala 'mudik lebaran' kiranya bukan hanya merupakan kebiasaan berkumpul antara keluarga atau kerabat saja tetapi juga betapa kuatnya tradisi sebagai pedoman hidup masyarakat. Mudik Lebaran tersebut seperti kita ketahui menyebabkan perubahan sosial yang sifatnya temporer tetapi rutin dan berdampak kepada berbagai sisi kehidupan lainnya.

Pada masa silam kebanyakan kota adalah tempat bermukim raja atau para bangsawan, kemudian perdagangan domestik dan luar negeri menentukan sifat pertumbuhannya. Spesialisasi dalam pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi kota menyebabkan perkembangan pelapisan sosial yang cepat, mobilitas sosial juga makin tinggi. Urbanisasi yang berlangsung sebelum tahun enam puluhan tampaknya tidak mengalami banyak masalah adaptasi pada lingkungan hidup kota. Hal itu mungkin antara lain karena mereka yang bermigrasi itu berasal dari lapisan atas masyarakat desa. Manakala kelompok lapisan atas tersebut



hampir semuanya pindah mukim menjadi orang kota, maka setelah tahun tujuh puluhan lapisan atas baru ditambah lapisan-lapisan sosial di bawah berdatangan ke kota.

Para migran yang tiba di kota kemudian menemukan berbagai masalah, seperti kesempatan kerja yang kecil dan lokasi untuk tempat bermukim. Kampung-kampung kota dengan jumlah penduduknya makin bertambah dan secara perlahan perubahan sosial berlangsung dalam berbagai sisi kehidupan. Kehidupan kota mendorong warganya berpikir dalam lingkup sekuler, relasi keluarga makin longgar, fungsi keluarga patah dan digantikan oleh institusi sosial tertentu.

Kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan wilayah pemukiman makin luas, Program Perbaikan Kampung (Kampung Improvement Programme) terutama di Jakarta, Bekasi dan Tangerang tampaknya relatif berhasil dalam kurun waktu lima tahun pertama (Garna, 1981). Perkembangan wilayah DKI Jakarta dan Botabek sebagai 'daerah penyangga' Jakarta mengikis keberhasilan tersebut, apalagi pembangunan perumahan makin meluas. Perpindahan penduduk seperti itu memungkinkan mempercepat perubahan sosial, salah satu hal yang menarik ialah tradisi untuk tetap tinggal dalam lingkungan wilayahnya sendiri tetap hidup. Orang Betawi misalnya, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya masih tetap dalam wilayah yang mereka anggap 'lingkungan hidup Betawi'. Tidak beranjak terlalu jauh untuk menghindarkan diri dari perubahan sedemikian cepatnya itu. Walaupun demikian mereka terus menjalankan tradisinya. Sikap adaptif terhadap setiap keadaan hidup dan lingkungan sosial yang dialaminya itu telah terbina oleh perjalanan sejarah kehidupan kelompok tersebut.

Pedesaan yang berada di sekitar kota cenderung mengalami perubahan sosial yang lebih cepat dibandingkan dengan di desa pedalaman. Hal itu sebenarnya tidak berlaku umum, karena desa pedalaman yang jauh dari kota dapat terkena akibat gerak penduduk. Misalnya penduduk di wilayah lahan yang digunakan Waduk Saguling dan Cirata harus mencari lahan pertanian dan bermukim baru, atau berganti bidang kerja, ataupun trans-

migrasi dan urbanisasi. Lahan yang relatif terbeli mereka tentulah yang lebih jauh dari jangkauan kota, yang tentunya di tempat tersebut telah ada penduduk atau pemilikinya. Kedatangan penduduk desa yang baru itu menyebabkan berbagai perubahan, misalnya terjadi kepadatan penduduk, harga tanah naik dan dengan adanya perubahan seperti itu masyarakat setempat perlu menata kembali relasi sosial mereka. Selain itu dengan gencarnya masukan dari luar, baik melalui program-program pembangunan desa maupun pelaksanaan rutin pemerintahan, makin menambah beban organisasi dan struktur sosial pedesaan. Penataan kembali tatanan sosial pedesaan relatif lambat dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh termaksud, dikhawatirkan bahwa tradisi sudah ditinggalkan tetapi institusi baru belum mampu berjalan.

##### **5. Tradisi Akomodasi dan Modernisasi dalam Masyarakat Indonesia**

Tampaknya kita tidaklah terlalu perlu untuk menggunakan alat analisis yang tidak menyentuh tradisi sebagai warisan budaya dalam dikotomi antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, sehingga analisis lanjut tentang proses transisi dari satu tahapan ke tahapan lainnya tidak mengaitkan antara kedua kategori itu. Masyarakat tradisional dan modern adalah abstraksi atau konstruksi mental yang membentuk model-model yang disederhanakan untuk memahami faktor terpenting yang menjelaskan kompleksitas kenyataan sejarah (Kahl, 1968:4).

Ciri-ciri yang digunakan oleh ilmuwan Barat untuk membedakan antara tradisional dengan modern ialah pembagian kerja, teknologi, derajat urbanisasi, ekonomi, edukasi dan komunikasi serta nilai-nilai budaya (Kahl, 1968). Anggapan itu harus dirubah, karena kenyataan dan masyarakat Indonesia dalam proses pembangunan menempuh ketiga hal itu, tradisi akomodasi dan modernisasi. Tradisi masyarakat mengenal pembagian kerja sebagai cara untuk mendayagunakan potensi dalam memenuhi keperluan hidupnya. Mereka yang dianggap memiliki teknologi sederhana, misalnya Orang Asmat dari Irian Jaya, tak mungkin



mempunyai kesenian yang indah dan tinggi. Melalui pencurahan seni dalam ukiran, penggambaran nenek moyang dan upacara yang menyertainya menunjukkan bahwa pola pikir serta pandangan dunianya tidaklah serendah anggapan orang bahwa 'orang primitif itu tak mampu berpikir modern', apalagi menghasilkan karya seni semacam itu.

Makna yang dapat ditarik bahwa pikukuh (adat, aturan) Orang Baduy merupakan "lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung" (panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung) memperlihatkan bahwa pola pikir positif atau dasar normatif bagi hukum sebagai pedoman hidup warga masyarakat, bukan hanya milik orang modern saja. Orang modern berpikir, bersikap dan abstraksinya itu dinyatakan dengan bahasa, demikian pula halnya dengan Orang Baduy bahasa tidak hanya alat komunikasi belaka tetapi menyimpan misteri sejarah kehidupan mereka.

Tradisi Orang Baduy, atau orang mana pun juga, adalah tatanan sosial yang berwujud mapan sebagai bentuk hubungan antara unsur-unsur kehidupan maupun sebagai bentuk aturan (pikukuh) sosial yang memberi pedoman tingkah laku dan tindakan anggota suatu masyarakat. Titik mula dari perubahan sosial yang berlaku pada Orang Baduy ialah adaptasi terhadap lingkungan kehidupannya. Perubahan juga menambah kapasitas adaptasi, yang dari perjalanan kehidupan mereka telah memperoleh kontak dengan dunia luar dan institusi yang tumbuh sebagai hasil interaksi mereka sendiri.

Manakala pengaruh yang datang dari luar masyarakat menghadapi tatanan sosial yang memiliki tradisi kelenturan tertentu untuk mengatur derajat adaptasinya maka perubahan sosial relatif cepat. Pengaruh yang beragam tersebut dapat membentuk dan menambah khazanah institusi sosial dan budaya masyarakat, itulah identitas baru sebagai bentukan perubahan sosial. Apabila tradisi telah berurat akar dalam kurun waktu lama dengan kelenturan terbatas karena kualitas seleksi berlaku terhadap institusi sosial yang belum ada atau lengkap, perubahan sosial cenderung berlangsung pada institusi itu saja.

Toleransi yang menjadi salah satu sifat penting orang Indonesia merupakan peluang akan adanya sikap dan tindakan akomodatif kepada perangkat-perangkat yang dibawa atau diakibatkan oleh perubahan sosial. Adapun bagi kelompok masyarakat yang derajat toleransinya relatif rendah perlu terlebih dahulu menumbuhkan kehendak adaptasi. Walaupun demikian tidaklah bijak apabila toleransi yang menyebabkan kemudahan untuk beradaptasi tersebut selalu digunakan untuk kepentingan lain di luar dari tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia.

## 6. Kesimpulan

6.1 Alam sosial atau dunia sosial manusia ialah binaan abstrak dari teori-teori yang didasarkan pada penelitian empirik. Dari sisi empirik alam sosial itu adalah tingkah laku dan interaksi berpola yang dilakukan oleh anggota suatu masyarakat. Studi tentang perubahan sosial berwujud oleh dua sisi kehidupan manusia, yaitu kewujudan bentuk hubungan yang mapan antara tatanan sosial dan perubahannya dari waktu ke waktu lain. Karena itu dengan mempelajari manusia secara holistik integratif yang tetap setara dan berkaitan erat sisi teoretik serta aplikatif. Kejelasan tentang perubahan sosial lebih tampak dalam dua atau lebih rentangan waktu.

6.2 Perubahan sosial terkait dengan proses pembangunan, yang sebelumnya juga mengalami perubahan dalam kurun waktu yang panjang. Adapun kaitan dengan lingkup yang global ialah perubahan wilayah industri sekaligus wilayah sumber, atau industri beralih ke tempat sumber dan bahan. Model perubahan sosial yang dianggap paling cocok bagi Indonesia adalah meletakkan secara setara tiga karakteristiknya, tradisi akomodasi dan modernisasi.

## Acuan

- Cochrane. G. 1971; *Development Anthropology*. New York: Oxford University Press.
- Departemen Sosial RI 1986; *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing*. Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing, Depsos RI.



- Etzioni, A. dan Etrioni-Halevy. ed. 1973; *Social Change: Sources, Patterns, and Sequences*. New York: Basic Books.
- Frank. Andre G. 1967; *Sociology of Development and Underdevelopment of Sociology*, Pluto Press.
- Garna, Judistira, 1981; *Socio-economic Survey: Bekasi*. Bogor: Joint Urban Dev. Consultants.
- Garna, Judistira, 1987; *Orang Baduy*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Garna, Judistira, 1988a; *Tangtu Telu Jaro Tujuh: Kajian Struktural Masyarakat Baduy*. Banten Selatan, Jawa Barat.
- Garna, Judistira, 1988b; *Perubahan Sosial-budaya Baduy*. Bandung: Fakultas Pasca-sarjana, Unpad.
- Garna, Judistira, 1989; *The Baduy of West-Java: Adaptation and change to development*. Bandung: Fakultas Pascasarjana Unpad.
- Harsojo, 1972; *Social Change and Urban Problems in Indonesia*. Bandung: Lembaga Penyelidikan Kemasjarakatan Universitas Padjadjaran.
- Kahl. Joseph A. 1968; *The Measurement of Modernism. A Study of Values in Brazil and Mexico*. Austin: University of Texas Press.
- Lauer, R.H. 1977; *Perspective on Social Change*. Boston: Allyn and Bacon.
- Linton, R. ed. 1945; *The Science of Man in the World Crisis*. New York: Columbia University Press.
- Warshav, Leon H. 1975; *The Current State of Sociological Theory: A Critical Interpretation*. New York: David McKay Cov. Inc.
- Rustam Sani. 1986; "Teori Perubahan Sosial dalam Sosiologi: Ditaksir Berdasarkan Perspektif Islam". Dalam *Jurnal Antropologi dan Sosiologi*. Jilid 14, hlm. 3-19.

*Jika kekayaan merupakan tujuan iman, jika patriotisme menjadi sarana kepentingan pribadi, dan jika pendidikan menjadi alat mengejar pangkat, aku lebih suka menjadi orang yang tidak usahi beriman, bukan patriot, dan orang bebal yang rendah hati.*

Gibran K. Gibran



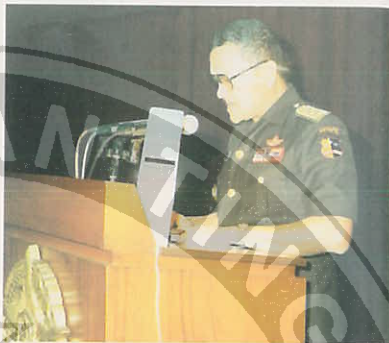
---

## BERITA BERGAMBAR

---

### PEMBUKAAN DIKREG KE-29 T.P. 1993/1994 SESPIM POLRI TANGGAL 24 JUNI 1993

Laporan kesiapan pendidikan,  
disampaikan oleh Ka Sespim Polri  
Mayjen Pol. Drs. Soehardi.



Amanat Kapolri, disampaikan  
oleh Demin Kapolri  
Mayjen Pol. Drs. Sedia Oetomo



Suasana upacara Pembukaan Dikreg ke-29.





# ORIENTASI LINGKUNGAN PASIS SESPIM POLRI DIKREG KE-29 T.P. 1993/1994



■ Saat mengumpulkan data di lingkungan Perkantoran Sespim, "Tak ada meja tulis, pintu pun jadi." ■ Istirahat sejenak, sambil berdiskusi. ■ "Penghijauan", kegiatan dalam orientasi lingkungan. ■ Potong kompas mendaki ke Gunung Putri.





## HARI ULANG TAHUN BHAYANGKARA KE-47



Amanat Kapolri, disampaikan inspektur upacara Mayjen Pol. Drs. Soehardi.

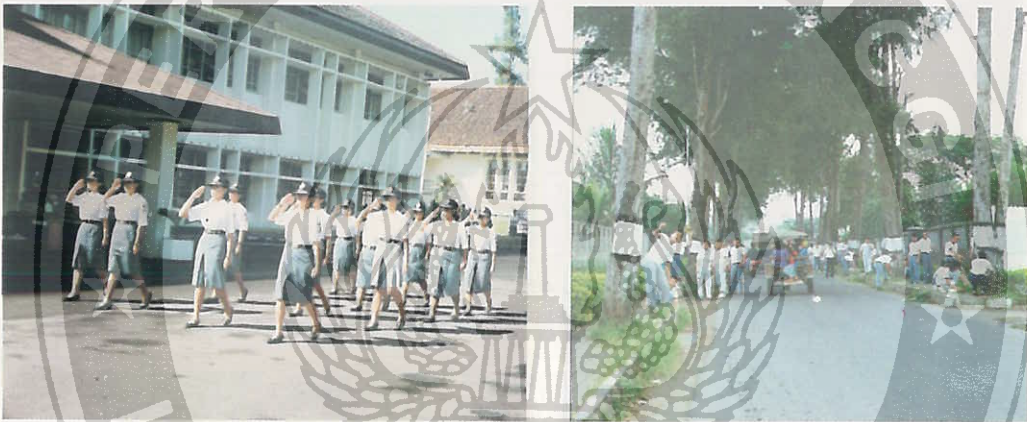


Penerima tanda kehormatan.





Khitanan massal, bakti lingkungan dan olah raga merupakan beberapa kegiatan yang terekam dalam memeriahkan Hari Bhayangkara ke-47.





# KEGIATAN WISATA JUANG PASIS SESPIM POLRI DIKREG KE-29 T.P. 1993/1994

Musium Asia Afrika Bandung, salah satu obyek kunjungan wisata juang.



Dialog Pasis dengan Staf PT Pindad di Bandung.



Pengamatan langsung Proses Produksi di Pusat Industri Pesawat Terbang Nusantara.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA





**REUNI SUSREG II/"SATYA BHAKTI" T.P. 1975/1976  
TANGGAL 28 S/D 30 AGUSTUS 1993**



Sarasehan tentang Pembinaan Alumni Sespim Polri, merupakan kegiatan hari kedua dalam Reuni Susreg II.



"Membina Jiwa Wiraswasta Menuju Keluarga Sejahtera dalam Rangka Mengembangkan Konsep Kesejahteraan Prajurit Polri" adalah tema Seminar, yang dilaksanakan di hari ketiga Reuni Susreg II.

Peserta Seminar terdiri dari para Alumni Susreg II.





## SEPUTAR KAMPUS

Ka Sespim Polri Mayjen Pol. Drs. Soehardi tengah menyampaikan amanat pada Upacara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Mess Pasis.



Foto bersama Pengurus Senat Pasis Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-29 Tahun Pendidikan (T.P.), 1993/1994, Sespim POLRI, se usai Upacara Pelantikan.



Serah terima jabatan Kepala Departemen dan Kepala Sekretariat Lembaga. Tampak pada gambar penandatanganan serah terima jabatan Ka Setlem dari Kol. Pol. Drs. Agus Sarman kepada Kol. Pol. Drs. Eris Harisman.





**KULIAH KERJA PASIS SESPIM POLRI  
DIKREG KE-29 T.P. 1993/1994**



Paparan Kapolres Metro Jakarta Utara.



Menghimpun dan mengumpulkan data.